

SKRIPSI

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN,
UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT,
DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT
TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
PADA SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI
BEI TAHUN 2021-2023**



DIAJUKAN OLEH

NAMA : MAYVELLINE ALYA LIOENARDO

NIM : 125220057

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA AKUNTANSI**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

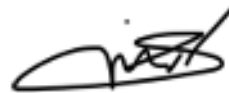
Persetujuan

Nama : MAYVELLINE ALYA LIOENARDO
NIM : 125220057
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan
Komisaris, Komite Audit, dan Frekuensi Rapat Komite
Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12-Desember-2025

Pembimbing:
SUSANTO S., SE.,M.M.,Ak.,CPA,
CPMA,CA,ACPA
NIK/NIP: 10195010



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Pengesahan

Nama : MAYVELLINE ALYA LIOENARDO
NIM : 125220057
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.
Title : The Influence of the Proportion of Independent Commissioners, the Size of the Board of Commissioners, the Audit Committee, and the Frequency of Audit Committee Meetings on Financial Statement Fraud.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 08-Januari-2026.

Tim Penguji:

1. MERRY SUSANTI, S.E, M.Si, AK, CA.
2. SUSANTO S., SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA
3. MALEM UKUR TARIGAN, Drs., Ak., M.M., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
SUSANTO S., SE.,M.M.,Ak.,CPA,
CPMA,CA,ACPA
NIK/NIP: 10195010



Jakarta, 08-Januari-2026
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas. Segala perhatian, pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini. Semoga hasil dari usaha dan proses ini dapat menjadi wujud rasa terima kasih yang tulus serta membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu.

MOTTO

“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu.”(Amsal 16:3)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

JAKARTA

**PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN DEWAN
KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE
AUDIT TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA
SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021–2023. Sampel dipilih dengan purposive sampling dan menghasilkan 43 perusahaan dengan 129 observasi. Data sekunder dari laporan tahunan diolah menggunakan *Microsoft Excel 2021* dan *EViews 12* melalui analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa mekanisme tata kelola berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Implikasinya, efektivitas pengawasan dewan komisaris dan komite audit perlu diperkuat untuk meminimalkan risiko *fraud*.

Kata kunci: Komisaris Independen, Dewan Komisaris, Komite Audit, Frekuensi Rapat, Kecurangan Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This study examines the effects of the proportion of independent commissioners, board size, audit committee, and audit committee meeting frequency on financial statement fraud in financial sector companies listed on the IDX for 2021–2023. Using purposive sampling, 43 companies with 129 observations were selected. Secondary data from annual reports were processed with Microsoft Excel 2021 and EViews 12 using panel data regression. The results show that certain corporate governance mechanisms significantly influence financial statement fraud. The findings imply that strengthening the monitoring roles of the board of commissioners and audit committee is essential to reduce fraud risks.

Keywords: Independent Commissioners, Board Size, Audit Committee, Meeting Frequency, Financial Statement Fraud.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Tarumanagara dengan judul "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit dan Frekuensi Rapat Komite Audit pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023".

Proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Susanto S., SE., M.M., Ak., CPA, CPMA, CA, ACPA. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., CPMA, CA, CPA (Aust.), CSRS, ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menyusun skripsi ini.
4. Seluruh dosen, asisten dosen, dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang telah diberikan selama masa studi.
5. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan, semangat, serta motivasi yang tidak pernah berhenti diberikan.

6. Kelvin Ryuji Evander yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa dan senantiasa menemani selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, pengertian, dan kesabaran yang diberikan menjadi sumber bagi penulis untuk bertahan dan menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.
7. Teman-teman YAHPP Clara Aurelia Effendi, Emily Aimee, dan khususnya Madelyn Agrata dan Verrencia Ng dan 7 Naga Sipil yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi serta menemani penulis dalam melaksanakan hingga menyelesaikan penelitian ini.
8. Keluarga besar LIVOSTA khususnya Michelle Tirtabudi, Michael Tirtabudi, Joseph Rivaldo Tami, dan Jesslyn Rianto, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi serta menemani penulis dalam melaksanakan hingga menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang selalu membantu, berdiskusi, dan memberikan dukungan selama proses kuliah hingga penyusunan skripsi.
10. Semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun telah memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi pembaca, khususnya di bidang akuntansi dan manajemen keuangan.

Jakarta, 12 Desember 2025



Mayvelling Alya Lioenardo

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	6
3. Batasan Masalah	8
4. Rumusan Masalah.....	9
B. Tujuan dan Manfaat penelitian	9
1. Tujuan	9
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Gambaran Umum Teori	12
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
B. Definisi Konseptual Variabel	13
1. Kecurangan Laporan Keuangan (<i>Financial Statement Fraud/FSF</i>).....	13

2.	Proporsi Komisaris Independen.....	14
3.	Ukuran Dewan Komisaris.....	14
4.	Komite Audit.....	15
5.	Frekuensi Rapat Komite Audit	15
C.	Kaitan antara Variabel - variabel.....	16
1.	Proporsi Komisaris Independen dan Kecurangan Laporan Keuangan 16	16q
2.	Ukuran Dewan Komisaris dan Kecurangan Laporan Keuangan	16
3.	Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan	17
4.	Frekuensi Rapat Komite Audit dan Kecurangan Laporan Keuangan	17
D.	Penelitian yang Relevan.....	18
E.	Hipotesis dan Kerangka Pemikiran.....	22
1.	Kerangka Pemikiran	22
2.	Hipotesis:	23
BAB III METODE PENELITIAN		26
A.	Desain Penelitian	26
B.	Populasi dan Sampel.....	27
C.	Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	27
1.	Variabel Dependen (Y)	27
2.	Variabel Independen (X).....	29
D.	Uji Pemilihan Model Terbaik Regresi Data Panel	32
1.	Common Effect Model (CEM)	32
2.	Fixed Effect Model (FEM)	32
3.	Random Effect Model (REM)	33
E.	Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	33
1.	Uji Chow.....	34

2. Uji Hausman	34
3. Uji Lagrange Multiplier (LM)	34
F. Analisa Data	35
1. Analisis Statistik Deskriptif	35
2. Analisis Regresi Linier Berganda	36
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	36
4. Uji Kelayakan Model (Uji F)	37
5. Uji t (Uji Parsial)	37
G. Asumsi Analisis Data	37
1. Uji Normalitas	38
2. Uji Multikolinearitas	38
3. Uji Heteroskedastisitas	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Subjek Penelitian	40
B. Deskripsi Obyek Penelitian	43
1. Statistik Deskriptif	44
C. Hasil Pemilihan Model Terbaik	46
1. Uji <i>Chow</i>	46
2. Uji <i>Hausman</i>	49
3. Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	51
D. Hasil Uji Asumsi Analisis Data	53
1. Uji Normalitas	53
2. Uji Multikolinieritas	55
3. Uji Heteroskedasitas	57
E. Hasil Analisis Data	59

1. Analisi Regresi Linier Berganda.....	59
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	61
3. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)	62
4. Hasil Uji t (Uji Parsial)	63
F. Pembahasan	65
1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap kecurangan laporan keuangan.....	66
2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan.....	68
3. Pengaruh Komite Audit terhadap kecurangan laporan keuangan.	69
4. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap kecurangan laporan keuangan.....	71
BAB V PENUTUP	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. KETERBATASAN DAN SARAN	74
1. Keterbatasan.....	74
2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3. 1 Rumus Beneish M-score	28
Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel	31
Tabel 4. 1 Kriteria dan penentuan sampel.....	40
Tabel 4. 2 Sampel Perusahaan Terpilih	42
Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 4 Hasil Uji Common Effect Model	47
Tabel 4. 5 Hasil Uji Fixed Effect Model.....	48
Tabel 4. 6 Hasil Uji Chow.....	49
Tabel 4. 7 Hasil Uji Random Effect Model	50
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman	51
Tabel 4. 9 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	53
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinieritas	56
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteriskedastisitas	58
Tabel 4. 12 Hasil Analisa Regresi Linier Berganda.....	59
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61
Tabel 4. 14 Hasil Uji F.....	62
Tabel 4. 15 Hasil Uji t.....	63
Tabel 4. 16 Rangkuman Hasil Penelitian.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 List Data Perusahaan	80
Lampiran 2 Hasil Output Software E-views 12.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang

Penyajian laporan keuangan yang dimanipulasi merupakan bentuk penyimpangan dan sangat merugikan dalam praktik tata kelola perusahaan. Tindakan manipulatif semacam ini dapat mengikis kepercayaan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari investor, kreditor, hingga publik yang bergantung pada transparansi pasar keuangan. Isu kecurangan laporan keuangan juga menjadi perhatian serius, khususnya pada sektor perbankan. Sektor ini dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang sangat sensitif terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan. Perbankan merupakan industri yang diatur secara ketat dan bergantung penuh pada integritas informasi keuangan dalam menjaga likuiditas, kualitas aset, serta kepatuhan terhadap regulasi prudensial. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan pelaku, tetapi juga dapat menjalar ke stabilitas ekonomi yang lebih luas. Contoh kasus internasional yang paling menonjol adalah kebangkrutan *Lehman Brothers* pada tahun 2008, yang kemudian menjadi pemicu krisis finansial global. Perusahaan tersebut diketahui menggunakan skema akuntansi yang dikenal sebagai Repo 105 untuk menyamarkan kewajiban dan memperindah kondisi keuangannya. Praktik tersebut berhasil menutupi kondisi riil perusahaan dalam jangka pendek, namun pada akhirnya menyebabkan kejatuhan yang dramatis. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa lemahnya mekanisme pengawasan dan penerapan *good corporate governance* dapat membuka peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan, bahkan pada institusi keuangan besar yang dianggap mapan.

Untuk mendeteksi indikasi kecurangan, model *Beneish M-Score Model* menjadi salah satu metode yang sering digunakan oleh penelitian ini maupun praktisi keuangan. Model ini menggunakan berbagai rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi laba atau pelaporan keuangan yang menyimpang. Dengan demikian, model ini memungkinkan identifikasi *fraud* secara lebih objektif dibanding sekadar audit eksternal atau opini auditor. Agar pencegahan *fraud* lebih efektif, maka mekanisme tata kelola perusahaan seperti proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, serta frekuensi rapat komite audit perlu diperhatikan secara serius sebagai bagian dari sistem pengawasan internal.

Menurut (ACFE, 2024), *fraud* laporan keuangan termasuk jenis *fraud* yang paling jarang muncul, namun memiliki dampak kerugian paling besar bagi perusahaan maupun industri secara keseluruhan. *Fraud* ini dilakukan melalui rekayasa pencatatan akuntansi seperti pengakuan pendapatan fiktif, perataan laba (*income smoothing*), hingga manipulasi akun akrual. Praktik-praktik tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan investor, kreditor, hingga regulator.

Dalam sistem good corporate governance, komisaris independen berperan sebagai mekanisme kunci yang memastikan proses pengawasan berlangsung secara objektif. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang dan manipulasi laporan keuangan, (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) melalui POJK No. 33/POJK.04/2014 mewajibkan seluruh perusahaan publik memiliki sekurang-kurangnya 30% komisaris independen dari seluruh anggota dewan komisaris. Regulasi ini menegaskan pentingnya independensi dalam pengawasan sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa komisaris independen secara jumlah belum sepenuhnya mampu mencegah kecurangan laporan keuangan. Kasus dugaan *window dressing* dan pengakuan transaksi terkait Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menunjukkan bahwa besar kecilnya dewan pengawas tidak selalu menjamin efektivitas pengawasan komisi DPR/BAKN pernah memanggil manajemen BTN untuk mengklarifikasi dugaan praktik pemolesan laporan keuangan dan penyaluran kredit yang tidak sesuai prosedur. Dugaan praktik tersebut (termasuk pemberian fasilitas kredit yang dipertanyakan) berpotensi menutupi kualitas aset dan menurunkan transparansi laporan keuangan sehingga memengaruhi perlindungan pemegang kepentingan dan kepercayaan investor. Pernyataan resmi dan upaya klarifikasi dari BTN serta dokumentasi laporan keuangan/laporan tahunan perseroan menjadi penting untuk menilai sejauh mana mekanisme pengawasan korporat termasuk peran komisaris independen berjalan efektif atau justru sekadar memenuhi persentase formal tanpa keterlibatan pengawasan yang proaktif.

Meskipun proporsi komisaris independen menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga objektivitas pengawasan, efektivitas tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada sisi independensi, melainkan juga pada ukuran keseluruhan dewan komisaris. Ukuran dewan menentukan sejauh mana fungsi monitoring dapat dijalankan secara komprehensif, termasuk dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan agar bebas dari praktik manipulasi.

(Otoritas Jasa Keuangan, 2014) melalui POJK No. 33/POJK.04/2014 mewajibkan setiap perusahaan publik mempunyai jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit dua orang agar proses pengawasan tidak hanya bertumpu pada satu pihak. Regulasi ini pada dasarnya bertujuan memastikan adanya kecukupan anggota untuk menjalankan fungsi kontrol yang efektif. Namun, ukuran dewan yang

sesuai regulasi tidak selalu menjamin efektivitas pengawasan di lapangan.

Fenomena tersebut terlihat pada kasus PT Bank Bukopin Tbk pernah terungkap melakukan revisi laporan keuangan untuk periode 2015–2017 laba bersih 2016 direvisi dari sekitar Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 miliar. Kasus ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap jumlah anggota dewan belum tentu diikuti dengan kualitas pengawasan, sehingga celah terjadinya kecurangan laporan keuangan tetap ada.

Kinerja pengawasan dewan komisaris terhadap praktik pelaporan keuangan tidak dapat dilepaskan berdasarkan fungsi komite audit yang mengawasi teknis proses pelaporan, sistem kontrol internal, serta kegiatan audit eksternal. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) melalui POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mewajibkan perusahaan publik memiliki anggota minimal 3 orang, yang mayoritas independen serta memiliki kompetensi dalam akuntansi dan keuangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa komite audit dirancang sebagai mekanisme perlindungan terhadap pemegang saham serta memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar, transparan, serta bebas dari manipulasi.

Secara struktural, keberadaan komite audit secara struktural belum menjamin efektivitas pengawasan secara fungsional. Hal ini dapat terlihat dari kasus PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 (BWS) (2025), yang melakukan dugaan *fraud* melalui penyalahgunaan fasilitas transaksi keuangan yang nilai temuan awalnya mencapai sekitar Rp1,28 triliun. Nyatanya, sebagai perusahaan publik, BWS sudah memiliki komite audit sesuai ketentuan tata kelola dan kewajiban emiten. Kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit di atas kertas tidak otomatis menjamin pengawasan

berjalan optimal. Jika fungsi kontrol tidak dijalankan secara aktif dan independen, struktur tata kelola hanya menjadi formalitas semata.

Selain struktur dan jumlah anggota, efektivitas komite audit juga sangat ditentukan oleh intensitas aktivitas pengawasan yang dijalankan. Salah satu indikator terukur dari aktivitas tersebut adalah frekuensi rapat komite audit, karena rapat menjadi forum evaluasi laporan keuangan, pembahasan temuan auditor internal maupun eksternal, serta pengambilan keputusan terkait langkah koreksi atas potensi penyimpangan. Sejalan dengan hal tersebut, (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) melalui POJK No. 55/POJK.04/2015 Pasal 13 mengatur bahwa komite audit wajib menyelenggarakan rapat minimal empat kali rapat dalam satu tahun, serta seluruh keputusan rapat harus terdokumentasi sebagai bentuk audit trail pengawasan.

Walaupun frekuensi rapat komite audit menjadi sebuah indikator penting dalam efektivitas *corporate governance*, intensitas rapat yang tinggi pun tidak selalu menjamin tercapainya fungsi pengawasan secara optimal. Fenomena ini tercermin pada kasus PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), di mana terjadi fraud pada salah satu cabang dengan nilai kerugian sekitar Rp 30 miliar, sebagaimana disampaikan oleh OJK bahwa kasus tersebut merupakan kejadian serius dan berdampak signifikan. Meskipun sebagai emiten Maybank telah memenuhi ketentuan tata kelola dan menjalankan rapat komite audit secara rutin dalam setahun, fraud tetap terjadi dan tidak terdeteksi sedini mungkin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat yang tinggi sekalipun tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas pengawasan. Regulasi hanya menentukan jumlah minimum rapat, namun efektivitas pengawasan bergantung pada kualitas diskusi, kedalaman evaluasi terhadap laporan keuangan, tindak lanjut temuan audit, serta independensi komite dalam menekan risiko moral hazard manajemen. Maka, aktifnya jadwal rapat komite audit bukan hanya

persoalan kuantitas, tetapi lebih pada bagaimana rapat tersebut dijalankan sebagai sarana kontrol substantif, bukan sebatas pemenuhan formalitas tata kelola.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka akan diuji kembali penelitian yang berjudul **“PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2023”**.

2. Identifikasi Masalah

Temuan mengenai proporsi komisaris independen memperlihatkan hasil yang berbeda. Temuan sebelumnya, (Kusumawardani et al., 2023) menunjukkan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen dapat menekan kemungkinan terjadinya fraud karena independensi memperkuat fungsi monitoring. Namun, (Uwuigbe et al., 2019) menemukan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud*, mengindikasikan bahwa keberadaan dewan independen secara struktural belum cukup untuk menantang keputusan manajemen. Perbedaan temuan ini menegaskan adanya perdebatan empiris mengenai efektivitas komisaris independen dalam mencegah *fraud*.

Temuan mengenai ukuran dewan komisaris juga tidak konsisten. (Uwuigbe et al., 2019) mengungkapkan bahwa ukuran dewan juga tidak signifikan terhadap *fraud* karena dewan yang besar belum tentu efektif akibat lemahnya koordinasi dan partisipasi anggota. Sebaliknya, (Shanikat & Aldabbas, 2025) membuktikan bahwa dewan berukuran besar justru mampu menurunkan financial statement fraud melalui keragaman perspektif, keahlian, dan kapasitas monitoring yang lebih kuat. Temuan yang saling bertentangan ini membuka diskusi apakah

dewan berukuran besar meningkatkan efektivitas pengawasan atau justru menciptakan inefisiensi dalam tata kelola.

Penelitian mengenai komite audit juga mengindikasikan hasil yang tidak konsisten. (Essien, 2024) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, sehingga efektivitas komite audit dalam fungsi pengawasan masih dipertanyakan. Sebaliknya, (Shanikat & Aldabbas, 2025) membuktikan bahwa komite audit berperan signifikan dalam menekan *financial statement fraud*, terutama ketika anggotanya memiliki keahlian akuntansi dan komite audit melakukan rapat secara rutin. Perbedaan hasil ini menimbulkan pertanyaan apakah komite audit benar-benar mampu meningkatkan kualitas pengawasan atau apakah efektivitasnya bergantung pada kompetensi dan aktivitas komite audit itu sendiri.

Frekuensi rapat komite audit, salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas mekanisme pengawasan perusahaan. Secara teoritis, makin sering komite audit melakukan rapat, makin besar peluang bagi anggota komite untuk membahas temuan audit, mengevaluasi isu pelaporan keuangan, serta menindaklanjuti penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Shanikat & Aldabbas, 2025), yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan dalam menurunkan *financial statement fraud*. Rapat yang lebih rutin dianggap meningkatkan intensitas monitoring dan memungkinkan komite audit mendeteksi kesalahan atau indikasi fraud secara lebih dini.

Namun, temuan empiris lain justru menunjukkan hasil yang berbeda. (Alqatamin, 2018) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa intensitas rapat tidak selalu mencerminkan efektivitas pengawasan, karena kualitas diskusi,

kompetensi anggota komite audit, serta substansi agenda rapat lebih menentukan keberhasilan proses monitoring daripada sekadar jumlah rapat yang dilakukan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakpastian mengenai sejauh mana frekuensi rapat komite audit benar-benar berperan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan mencegah kecurangan laporan keuangan.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas karena membahas faktor-faktor *corporate governance* yang dapat memengaruhi *financial statement fraud*. Agar penelitian lebih terarah dan tidak melebar, maka penelitian ini hanya memfokuskan pada empat variabel independen, yaitu proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, serta frekuensi rapat komite audit. Variabel-variabel tersebut dipilih karena dianggap mewakili mekanisme utama dalam penerapan *corporate governance* yang berpotensi memengaruhi tingkat kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan.

Financial Statement Fraud sebagai variabel dependen diproksikan *Beneish M-Score Model* yang mampu mendeteksi indikasi manipulasi laporan keuangan melalui rasio-rasio keuangan. Objek penelitian dibatasi hanya pada perusahaan perbankan non-syariah (bank umum konvensional) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021 hingga 2023.. Pemilihan sektor ini didasarkan pada tingginya eksposur terhadap regulasi dan pengawasan, sehingga aspek tata kelola menjadi sangat penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan.

Penelitian ini juga terbatas pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan yang telah diaudit, data resmi Bursa Efek Indonesia, serta beberapa sumber pendukung lain yang relevan. Perusahaan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan kelengkapan informasi yang diperlukan sesuai variabel

penelitian selama periode observasi. Faktor-faktor eksternal di luar mekanisme tata kelola perusahaan seperti kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi pemerintah, maupun aspek non-keuangan lainnya tidak dianalisis secara mendalam. Karena itu, penelitian ini berfokus khusus pada bagaimana mekanisme corporate governance berperan dalam mengidentifikasi potensi kecurangan laporan keuangan.

4. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023?
- b. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023?
- c. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023?
- d. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023?

B. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

- b. Untuk mengetahui apakah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023
- c. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023
- d. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

2. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Manfaat Teoritis:
 - 1. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi dan tata kelola perusahaan dengan menyoroti pengaruh proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan pada sektor keuangan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman akademik mengenai peran mekanisme pengawasan internal dalam meminimalkan praktik fraud pelaporan keuangan, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian berikutnya
 - 2. Bagi penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan model analisis kecurangan laporan keuangan berbasis mekanisme tata kelola perusahaan. Temuan penelitian ini juga membuka peluang untuk kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan corporate governance dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, baik pada sektor keuangan maupun sektor industri lainnya.
- b. Manfaat Praktis

1. Bagi manajemen perusahaan sektor keuangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan memperkuat struktur tata kelola perusahaan, khususnya terkait komposisi dewan komisaris dan efektivitas komite audit. Pemahaman mengenai faktor-faktor pengendali fraud dapat membantu manajemen menyusun kebijakan pengawasan internal yang lebih strategis guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Bagi investor, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana mekanisme tata kelola perusahaan mampu meminimalkan risiko kecurangan laporan keuangan. Informasi tersebut dapat menjadi landasan dalam menganalisis kualitas tata kelola, kredibilitas pelaporan keuangan, serta prospek investasi perusahaan secara lebih objektif dan rasional.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2024). *The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. Association of Certified Fraud Examiners*, 1–106.
- Alqatamin, R. M. (2018). *Audit Committee Effectiveness and Company Performance : Evidence from Jordan*. 7(2).
<https://doi.org/10.5430/afr.v7n2p48>
- Avci, S. B., & Schipani, C. A. (2018). *Do Independent Directors Curb Financial Fraud ? The Evidence and Proposals for Further Reform* †. 93(3).
- Bao, R., Quan, Y., Sun, Y., & Zhang, J. (2025). Can independent directors effectively monitor controlling shareholders after reappointment ? *China Journal of Accounting Research*, 18(2), 100415.
<https://doi.org/10.1016/j.cjar.2025.100415>
- Beneish, M. D. (2004). *The Detection of Earnings Manipulation*. January.
- Essien, E. O. (2024). *Audit Committee Size and Financial Reporting Quality of listed Non-financial Firms in Sub-Saharan Africa : The Moderating Role of Board Independence*. 10(8), 1–20.
<https://doi.org/10.56201/jafm.v10.no8.2024.pg1.20>
- Febri, A. (2025). *PENGARUH KOMITE AUDIT , FINANCIAL TARGET , DAN FINANCIAL STABILITY TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD*. 3(8), 458–479.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Miltivariate*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132.
- Júnior, R. V., & Martins, O. S. (2019). *The Influence of Corporate Governance on the Mitigation of Fraudulent Financial Reporting*. 65–84.
<https://doi.org/10.7819/rbgn.v22i1.4039>
- Kusumawardani, M., Soediro, A., Adhitama, F., Farhan, M., Ekonomi, F., Sriwijaya, U., Financial, F., & Akuntansi, E. (2023). *Efektivitas Corporate Governance dan Fraudulent Financial Reporting*. 1301–1314.
- Litasia, R. E., Djajadikerta, H., Setiawan, A., & Wirawan, S. (2023). *Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen , Jumlah Komite Audit , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Sektor Keuangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2021*. 7, 21779–21785.
- Madany, N., & Rais, Z. (2022). *Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa*

- Efek Indonesia*. 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>
- Manry, D. (2023). *Financial statement fraud litigation , material weaknesses , and board characteristics*. 36(4), 349–368. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2022-0218>
- Meiliana, Ng, N., & Septiany, S. (2024). *companies effectively prevent fraud ?* 7(4), 609–625. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i4.34208>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK 33. Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan--Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik/POJK%2033.%20Direksi%20dan%20Dewan%20Komisaris%20Emiten%20Atau%20Perusahaan%20Publik.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.04 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. *Ojk.Go.Id*, 1–29. [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK%20PERIZINAN%20FINAL%20F.pdf)
- Purnamasari, R. N., & Syahputra, A. (2025). *Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran perusahaan dan Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. 2(2), 286–297.
- Shanikat, M., & Aldabbas, M. M. (2025). Perception of Corporate Governance Factors in Mitigating Financial Statement Fraud in Emerging Markets: Jordan Experience. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(8), 1–25. <https://doi.org/10.3390/jrfm18080430>
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D Penulis*.
- Uwugbe, O. R., Olorunshe, O., Uwugbe, U., Ozordi, E., Asiriwa, O., Asolu, T., & Erin, O. (2019). Corporate Governance and Financial Statement Fraud among Listed Firms in Nigeria. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 331(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/331/1/012055>